

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konsisten menjadikan demokrasi sebagai fondasi utama dalam sistem politiknya. Sejak era reformasi, prinsip-prinsip demokrasi semakin diperkuat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, serta adanya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin hak-hak dasar warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik.

Dalam praktiknya, demokrasi memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap pemerintah. Kebebasan berekspresi, baik melalui media massa, aksi demonstrasi, maupun platform digital, menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan publik. Demokrasi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan arah kepemimpinan melalui proses pemilihan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap warga negara menjadi bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya mencerminkan sistem politik, tetapi juga menjadi sarana perjuangan kolektif masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat (Siregar, 2022).

Dalam negara yang demokratis, masyarakat memegang kendali utama atas arah pilihan politiknya. Kedaulatan rakyat menjadi prinsip dasar yang menempatkan warga negara sebagai aktor sentral dalam menentukan siapa yang berhak memimpin serta kebijakan apa yang layak dijalankan. Dengan adanya kebebasan memilih dan berpendapat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima

kebijakan, tetapi juga penentu legitimasi kekuasaan politik itu sendiri (Siregar, 2022).

Peran tersebut semakin terlihat nyata dalam setiap perhelatan pemilu, di mana partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil akhir. Melalui hak pilih yang dimiliki, masyarakat dapat menilai, mempertimbangkan, dan akhirnya menentukan kandidat yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka. Proses ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tengah Masyarakat (Azhar, 2019). Pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan ruang strategis bagi masyarakat untuk menegaskan posisi dan kepentingannya dalam struktur kekuasaan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin matang, sekaligus menjadi indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat dan representatif (Fatih, 2019).

Namun, dalam praktiknya, perhelatan pemilu tidak selalu berjalan ideal sebagaimana prinsip demokrasi yang diharapkan. Berbagai persoalan kerap muncul dan berpotensi merusak kualitas demokrasi itu sendiri. Kelemahan administratif, seperti ketidakakuratan data pemilih, distribusi logistik yang tidak merata, hingga kurangnya profesionalitas penyelenggara, sering kali menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, perubahan aturan yang terjadi secara mendadak atau tidak konsisten juga dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Regulasi yang seharusnya menjadi pedoman justru dapat dipersepsikan sebagai alat kepentingan politik tertentu apabila tidak disusun secara transparan dan akuntabel. Bahkan keterlibatan pihak eksternal yang dikendalikan oleh aktor politik tertentu dapat menjadi salah satu bentuk intervensi pilihan politik di masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterbatasan masyarakat dalam mengakses dan menentukan pilihan politiknya.

Intervensi kekuasaan yang berlebihan menjadi ancaman serius bagi independensi dan integritas pemilu. Ketika aktor-aktor kekuasaan menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan hasil atau memobilisasi dukungan secara tidak *fair*, maka prinsip keadilan dalam demokrasi menjadi terdistorsi. Karenanya, diperlukan penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi masyarakat yang kritis guna menjaga agar proses pemilu tetap berjalan secara demokratis, transparan, dan berintegritas. Relasi kuasa antara aktor politik dan pihak eksternal yang dilibatkan dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi ini dapat mengarah pada pembatasan kebebasan dalam menentukan pilihan politik, munculnya konflik sosial di tingkat masyarakat, serta meningkatnya kemungkinan terpilihnya pemimpin yang tidak sepenuhnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Dalam Pemilu 2024, dinamika demokrasi di Indonesia menunjukkan sejumlah persoalan yang memicu perdebatan publik. Salah satu isu yang banyak disorot adalah dugaan adanya intervensi atau *cawe-cawe* dari kekuasaan dalam proses politik. Fenomena ini dipersepsikan sebagai bentuk keterlibatan aktor-aktor elit yang melampaui batas netralitas, sehingga berpotensi memengaruhi arah preferensi politik masyarakat. Dalam kerangka demokrasi, kondisi semacam ini menimbulkan kekhawatiran terhadap tergerusnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi electoral (Dea dkk., 2020).

Keterlibatan organisasi non formal atau Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam kontestasi politik, turut memperumit situasi. Idealnya, aparat keamanan berada dalam posisi netral dan profesional guna menjaga stabilitas serta keamanan jalannya pemilu. Namun, ketika muncul indikasi keberpihakan atau mobilisasi oleh aktor-aktor tertentu, maka hal tersebut dapat mencederai integritas proses demokrasi. Di sisi lain, keterlibatan ormas dalam politik praktis, khususnya yang memiliki basis massa kuat, juga berpotensi memengaruhi perilaku pemilih secara signifikan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam arena kompetisi politik.

Organisasi Masyarakat (ormas) merupakan kelompok sosial yang terbentuk secara sukarela oleh warga untuk mencapai tujuan tertentu, baik di bidang sosial, budaya, maupun kemasyarakatan. Dalam konteks lokal, ormas sering kali berperan sebagai aktor yang membantu menjaga ketertiban dan stabilitas lingkungan. Kehadiran mereka kerap dianggap penting, terutama dalam situasi yang membutuhkan mobilisasi cepat di tingkat akar rumput (Azhar, 2019).

Perkembangan ormas di Indonesia sangat pesat dan beragam terdapat dua ormas yang paling menonjol dari yang lain yaitu Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB), perkembangan anggota PP dan GRIB dari tahun ke tahun sangat pesat, menurut data dari Kemenpora Pemuda Pancasila pada Tahun 2019 ada 9 Juta anggota aktif dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 10 juta anggota. Sedangkan GRIB pada tahun 2011 adalah 1,4 juta dan pada tahun 2023 adalah 3 juta. dalam praktiknya, ormas dapat berfungsi sebagai mitra informal dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya pada momentum-momentum tertentu seperti kegiatan masyarakat atau bahkan perhelatan politik. Mereka memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan masyarakat lokal serta pemahaman terhadap kondisi sosial di wilayahnya. Hal ini memungkinkan ormas untuk berperan dalam pengamanan berbasis komunitas, meskipun secara formal tugas tersebut tetap berada di bawah kewenangan aparat negara (Fachrul, 2018).

Namun demikian, peran ormas dalam pengamanan juga perlu dilihat secara kritis, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan politik. Keterlibatan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan bias, konflik kepentingan, hingga praktik-praktik yang dapat mencederai prinsip netralitas dalam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar keberadaan ormas tetap berada dalam koridor fungsi sosialnya dan tidak menyimpang ke arah yang dapat merusak tatanan demokrasi. Selain itu, peran aktor politik lokal memberikan dorongan dan kuasa penuh kepada ormas dalam mengumpulkan basis dukungan politik di skala lokal atau daerah. Ormas seringkali terlibat secara transaksional dengan agenda dan kepentingan aktor politik lokal tertentu untuk memastikan dukungan dan suara masyarakat. Seperti dukungan pada

Khofiffah-Emil yang ditemukan bentuk-bentuk mobilisasi massa yang digunakan oleh Pemuda Pancasila di Jawa Timur yaitu mobilisasi langsung dan tidak langsung (Fachrul, 2018).

Pada kenyataannya, dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Majalaya peran organisasi masyarakat (ormas) tidak selalu berada dalam koridor fungsi sosial yang netral. Dalam berbagai konteks lokal, ormas kerap terlibat dalam praktik politik yang cenderung menyimpang dari prinsip demokrasi. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain terlihat dalam upaya intervensi terhadap pilihan politik masyarakat, baik melalui tekanan sosial, pengaruh tokoh lokal, maupun pendekatan persuasif yang tidak sepenuhnya bebas nilai. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara ormas dan masyarakat tidak selalu berjalan secara setara, melainkan dapat menciptakan dominasi tertentu dalam menentukan preferensi politik.

Dalam kasus pemilu 2024 di Majalaya, aktor politik dalam hal ini Iceu Handayani menjadi kandidat dalam kontestasi yang berlangsung. Peran aktor politik tersebut menggunakan relasi kuasa lewat pemuda Pancasila untuk menggait basis dukungannya. Secara tidak langsung juga, relasi yang terbangun tidak hanya bersifat politis dan instrumental, tetapi diperkuat oleh kedekatan emosional dan hubungan kekeluargaan yang melekat, mengingat posisi aktor politik sebagai istri dari tokoh ormas Pemuda Pancasila itu sendiri. Kondisi ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dibandingkan hubungan politik pada umumnya, karena dilandasi oleh kepercayaan, loyalitas, serta rasa solidaritas internal yang telah terbentuk sebelumnya. Kedekatan tersebut memungkinkan proses mobilisasi dukungan berlangsung lebih efektif, karena tidak hanya mengandalkan struktur organisasi, tetapi juga memanfaatkan jaringan personal dan hubungan kekeluargaan yang bersifat informal.

Selain itu, mobilisasi massa yang dilakukan oleh ormas sering kali bersifat agresif dan terorganisir, terutama dalam mendukung aktor politik lokal tertentu. Mobilisasi ini tidak jarang memanfaatkan jaringan sosial yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga mampu menggerakkan dukungan secara masif dalam waktu singkat. Dalam perspektif politik lokal, praktik ini dapat menciptakan ketimpangan

dalam kompetisi elektoral, karena kandidat yang memiliki akses terhadap ormas cenderung memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan dengan kandidat lainnya (Fachrul, 2018).

Gambar 1.1 Keterlibatan PP pada Pemilu Lokal



Sumber: *Kepri.co.id* (2024)

Keterlibatan Pemuda Pancasila di Majalaya pada Pemilu 2024 menimbulkan pertanyaan terkait struktur kekuasaan informal yang terbentuk dalam proses demokrasi lokal. Dalam beberapa wawancara awal, ditemukan bahwa sejumlah caleg atau aktor politik lokal secara terbuka menyatakan kedekatannya dengan tokoh-tokoh PP setempat. Beberapa bahkan menyebut organisasi ini sebagai “mitra lapangan” yang efektif dalam menjangkau pemilih dari komunitas marjinal. Relasi ini memperlihatkan pola kerja informal yang mungkin lepas dari pengawasan institusi penyelenggara pemilu. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperkuat pola patronase yang menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif. Fenomena ini perlu dikaji secara lebih mendalam sebagai bagian dari upaya memahami dinamika kekuasaan dan relasi sosial dalam politik lokal di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam relasi kekuasaan yang terbentuk dalam politik lokal, khususnya relasi kuasa antara ormas Pemuda Pancasila dan aktor politik dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Majalaya. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana kekuasaan didistribusikan, dijalankan, dan dinegosiasikan di antara aktor-aktor politik, termasuk peran strategis ormas

dalam memengaruhi dinamika tersebut (Andriyani dkk., 2021). Praktik ini tidak hanya dilihat sebagai aktivitas pengumpulan dukungan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik yang mencerminkan adanya relasi kuasa antara elit politik, aktor lokal, dan masyarakat sebagai basis massa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap pola-pola interaksi, bentuk pengaruh, serta mekanisme yang digunakan dalam proses praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Isu utama dalam penelitian ini adalah keterlibatan organisasi non-negara, khususnya Pemuda Pancasila, dalam proses mobilisasi politik dan relasi kekuasaan pada Pemilu 2024 di Kecamatan Majalaya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang peran, strategi, dan dampaknya terhadap demokrasi lokal. Mengacu pada minimnya kajian mikro-politik yang membahas praktik informal kekuasaan dalam pemilu lokal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk relasi kuasa yang terbangun antara Pemuda Pancasila dan aktor politik dalam Pileg 2024 di Kecamatan Majalaya?
2. Bagaimana strategi dan intervensi yang digunakan oleh Pemuda Pancasila dalam mendukung aktor politik tertentu dalam Pileg 2024 di Kecamatan Majalaya?
3. Bagaimana dampak relasi kuasa keterlibatan Pemuda Pancasila dan aktor politik lokal dalam Pileg 2024 bagi masyarakat di Kecamatan Majalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam dinamika politik lokal yang melibatkan organisasi semi-parmiliter seperti Pemuda Pancasila dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada konstruksi kekuasaan, strategi mobilisasi, dan dampaknya terhadap praktik demokrasi. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi empiris terhadap kajian politik Indonesia, khususnya dalam memahami relasi antara aktor informal dan proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana bentuk relasi kuasa yang terbangun antara Pemuda Pancasila dan aktor politik dalam Pileg 2024 di Kecamatan Majalaya.
2. Menganalisis strategi dan intervensi yang digunakan oleh Pemuda Pancasila dalam mendukung aktor politik tertentu dalam Pileg 2024 di Kecamatan Majalaya.
3. Menjelaskan dampak relasi kuasa keterlibatan Pemuda Pancasila dan aktor politik lokal dalam Pileg 2024 bagi masyarakat di Kecamatan Majalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam ranah politik lokal, relasi kekuasaan informal, dan mobilisasi politik oleh organisasi non-negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus mikro, penelitian ini memperkaya literatur tentang praktik demokrasi di tingkat akar rumput yang selama ini masih didominasi oleh studi makro dan nasional. Hasil temuan empiris dari penelitian ini berpotensi mengembangkan konsep-konsep seperti *clientelism*, *broker politik*, dan *kekuasaan informal*, terutama dalam konteks ormas semiparmiliter di Indonesia (Zaky, 2024). Selain itu, studi ini dapat menjadi landasan awal bagi pengembangan teori tentang negosiasi kekuasaan dalam demokrasi prosedural, serta menjembatani pemahaman antara kekuasaan formal-institusional dan kekuasaan sosialkultural dalam politik elektoral lokal.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki relevansi tinggi bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan demokrasi lokal. Pertama, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dapat memanfaatkan temuan ini untuk menyusun strategi pengawasan dan regulasi partisipasi kelompok non-negara dalam kontestasi politik secara lebih tepat sasaran. Kedua, pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat menjadikan hasil penelitian sebagai dasar untuk merancang kebijakan partisipasi politik warga

yang bebas dari tekanan informal. Ketiga, bagi organisasi masyarakat sipil dan LSM, hasil ini menjadi rujukan penting untuk program advokasi dan pendidikan politik yang lebih kontekstual, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap penetrasi kekuasaan informal. Keempat, tokoh masyarakat dan komunitas lokal dapat menggunakan wawasan ini untuk membangun ruang politik yang lebih transparan, inklusif, dan adil.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan relasi kekuasaan dan dinamika politik dalam konteks Pemilu 2024 di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Majalaya. Pemilu sebagai arena kompetisi politik tidak hanya melibatkan aktor formal seperti partai politik dan kandidat, tetapi juga aktor non-formal yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Salah satu aktor yang menonjol dalam konteks politik lokal adalah organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, yang berperan dalam proses strategi pemenangan serta pembentukan preferensi politik masyarakat.

Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Pemilu lokal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas mobilisasi politik biasa, melainkan sebagai bagian dari praktik kekuasaan yang bekerja dalam relasi sosial di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, relasi antara aktor organisasi dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam memahami bagaimana pengaruh politik dijalankan. Relasi tersebut tidak selalu bersifat formal atau struktural, tetapi sering kali terbangun melalui kedekatan sosial, jaringan informal, serta interaksi sehari-hari yang memungkinkan terjadinya proses memengaruhi secara berkelanjutan (Alrudi & Vanni, 2022).

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak terpusat, melainkan tersebar dalam berbagai praktik sosial dan relasi antarindividu. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui mekanisme paksaan, tetapi juga melalui cara-cara yang lebih halus, seperti pembentukan pengetahuan, produksi wacana, serta internalisasi norma dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kekuasaan hadir dalam berbagai aspek

kehidupan sehari-hari dan sering kali tidak disadari oleh individu yang terlibat di dalamnya, dalam kerangka ini, analisis difokuskan pada beberapa dimensi utama yaitu:

1. Dimensi relasi kekuasaan

Dimensi relasi kekuasaan digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antara aktor Pemuda Pancasila dengan masyarakat membentuk pola pengaruh tertentu. Relasi ini mencerminkan adanya posisi-posisi sosial yang memungkinkan aktor tertentu memiliki kemampuan lebih besar dalam memengaruhi keputusan atau sikap individu lain.

2. Dimensi wacana dan pengetahuan

Dimensi wacana dan pengetahuan menekankan pada bagaimana informasi, narasi, serta opini yang disebarkan oleh aktor tertentu dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas politik. Dalam hal ini, aktor yang memiliki otoritas sosial atau kedekatan dengan masyarakat cenderung lebih efektif dalam membangun legitimasi atas pandangan yang mereka sampaikan.

3. Dimensi kontrol sosial

Dimensi kontrol sosial digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme yang tidak selalu bersifat koersif. Individu dalam masyarakat cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma dan ekspektasi sosial yang berkembang di lingkungannya. Proses ini menunjukkan bahwa kepatuhan dapat terbentuk tanpa adanya paksaan langsung, melainkan melalui tekanan sosial yang bersifat implisit. Dalam konteks Pemilu, kondisi ini dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat yang cenderung mengikuti arah dominan dalam lingkungan sosialnya.

4. Dimensi penyebaran kekuasaan (mikro)

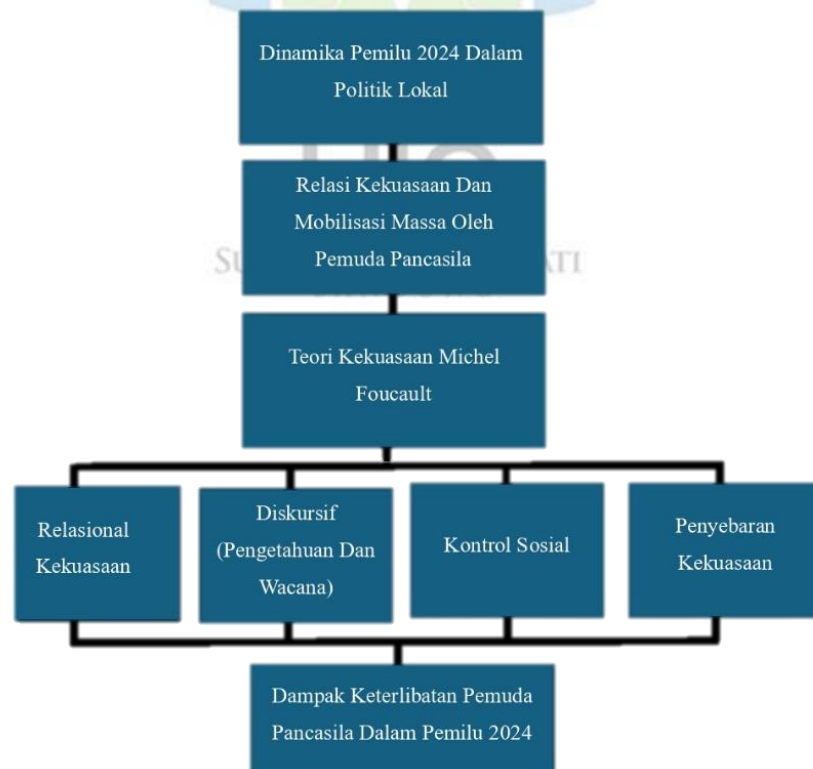
Dimensi penyebaran kekuasaan (mikro) menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada level elite, tetapi juga hadir dalam ruang-ruang sosial terkecil, seperti tingkat komunitas dan kecamatan. Hal ini memungkinkan aktor

lokal memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika politik di tingkat akar rumput (Foucault, 2011).

Melalui keempat dimensi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana praktik kekuasaan yang dijalankan oleh Pemuda Pancasila berkontribusi dalam proses mobilisasi massa serta pembentukan persepsi politik masyarakat. Analisis ini tidak hanya melihat bentuk keterlibatan secara langsung, tetapi juga menelusuri mekanisme-mekanisme halus yang memungkinkan pengaruh tersebut bekerja secara efektif dalam kehidupan sosial (Andriyani dkk., 2021).

Pada akhirnya, kerangka berpikir ini menempatkan dinamika Pemilu lokal sebagai ruang di mana berbagai bentuk kekuasaan berinteraksi dan saling memengaruhi. Keterlibatan aktor non-formal seperti Pemuda Pancasila menjadi penting untuk dikaji karena mampu menunjukkan bahwa praktik kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh relasi sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



Sumber: Olahan Peneliti (2026)